

**PENYIMPANGAN FUNGSI DAN NILAI-NILAI PANCASILA
DALAM PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI PEDOMAN HIDUP
DALAM BERMASYARAKAT**

Ervina Dwi Indriastuti *

ABSTRACT

Pancasila has become the agreement of the Indonesian people as the basis of the Unitary State of the Republic of Indonesia, but in its implementation efforts experience various obstacles both internal and external. Pancasila as a view of the nation's life needs to be implemented in real life, this has been exemplified by the founding fathers of the nation through hard work and struggle to produce Indonesian independence. Concern for the legal conditions that are in favor so far from the element of justice makes the mind interested in discussing whether the values taught by Pancasila are still heeded or ignored. Pancasila which is the nation's ideology as a view of life and the foundation in the activities of society, nation and state is impressed only to be memorized without application, including in the field of law. The quality of the state which is the benchmark for safeguarding the nation's ideology is eagerly awaited to control the implementation of a just law based on the noble values of Pancasila. Pancasila as the basis of the State is based as a source of law in Indonesia. All laws and regulations must be an elaboration of the principles contained in Pancasila. All laws and regulations that are not in accordance with Pancasila, are null and void. Therefore, to be able to understand the accuracy of laws and regulations, it is necessary to understand the concepts, principles and values contained in Pancasila. Pancasila as the basis of the state is implemented to be a legal norm that is compelling, binding and sanctions.

Keywords : Law, Indonesia, Norms, Pancasila

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang telah dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia.

Berbagai kebijakan hukum di era reformasi pasca amandemen UUD 1945 belum mampu mengimplementasikan nilai-nilai fundamental dari Pancasila dan UUD 1945 yang menumbuhkan rasa kepercayaan

yang tinggi terhadap hukum sebagai pencerminan adanya kesetaraan dan perlindungan hukum terhadap berbagai perbedaan pandangan, suku, agama, keyakinan, ras dan budaya yang disertai kualitas kejujuran yang tinggi, saling menghargai, saling menghormati, non diskriminatif dan persamaan di hadapan hukum.

Hukum adalah segala bentuk aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat pada tempat tertentu dan beresiko sanksi bagi yang melanggar. Aturan-aturan tersebut tidak hanya ditaati saja tapi harus dijalankan bahkan ditegakkan karena kalau tidak maka peraturan yang ada hanyalah sebagai susunan kata-kata yang tidak bermakna

* Ervina Dwi Indriastuti adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, dapat dihubungi melalui email : erfina-dwi-indriati@untagsmg.ac.id

dalam kehidupan masyarakat. Sebagai mana yang dinyatakan dalam UUD 1945 amandemen ke-3 pasal (1) ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan.

Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Inilah alasan kenapa hukum perlu ditegakkan, dan bagi Indonesia yang ditegakkan adalah supremasi hukumnya bukan supremasi kekuasaan.¹

Penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Hukum ditegakkan demi kepentingan masyarakat sehingga tercapainya masyarakat yang aman dan tentram.

Dalam kajian filsafat hukum temuan Notonagoro, menerangkan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sekalipun nyata bobot dan latar belakang yang bersifat politis, Pancasila telah dinyatakan dalam GBHN 1983 sebagai "satu-satunya azas" dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tercatat ada pula sejumlah naskah tentang Pancasila dalam perspektif suatu agama karena selain unsur-unsur lokal ("milik dan ciri khas bangsa Indonesia") diakui adanya unsur universal dalam setiap agama.²

PEMBAHASAN

Arti dari Sila-Sila Pancasila

Pancasila yang dalam bahasa sansekerta berarti lima dasar, memang

1 Soko Wiyono, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kerangka Negara Hukum yang Demokratis Berdasarkan Pancasila*. Jurnal Konstitusi. Vol. 1 No. 2, (Malang: Universitas Wisnuwardhana, 2009), hal. 17.

2 Notonegoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer* (Bina Aksara, Jakarta, 1983), hal. 10.

menjadi dasar dan pedoman untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terdapat lima inti yang memiliki kaitan satu dan yang lainnya. Diantaranya adalah ketuhanan, kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Pada sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang dapat diartikan Tuhan adalah segalanya dan mendapat tempat tertinggi pada setiap hati insan yang meyakini-Nya. Kecintaan manusia akan Tuhan adalah wujud dari ketaatan terhadap pencipta alam semesta dan seluruh isinya.

Sebelum Pancasila disahkan oleh pada 18 Agustus 1945, sempat terjadi perdebatan tentang sila pertama yang kemudian diputuskan sila pertama adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa" bukan yang termuat dalam Piagam Jakarta "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya". Hal itu dikarenakan Indonesia negara yang berazaskan Pancasila bukan syariat Islam. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi ada agama lain yang juga dianut oleh rakyat.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting sikap saling toleransi antar umat beragama. Jika toleransi menjadi kepribadian pada diri seluruh rakyat Indonesia maka tak akan ada pertikaian antar umat beragama yang sering terjadi akhir-akhir ini. Memang menjadi ironi sendiri, sebagai negara yang dikenal dengan sopan santun dan tata krama masyarakat ketimuran. Banyak pihak menyelesaikan masalah dengan kekerasan dan anarkisme. Agama seharusnya menjadi pemersatu rasa nasionalisme dalam diri para penganutnya, walaupun ada perbedaan tapi harusnya itulah yang makin menyatukan kita.

Sila kedua yang berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang berarti manusia yang mempunyai jiwa keadilan, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan wujud yang paling

sempurna, selain itu juga dibekali akan pikiran sehingga diharapkan mampu menjadi sosok pemimpin yang adil dan bijaksana didunia. Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa untuk hidup sendiri.

Manusia tersusun atas tubuh, wujud yang berupa benda. Tidak seperti makhluk yang lainnya, manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, berasa dan berkehendak. Hal itu diwujudkan dengan manusia yang memiliki banyak keinginan juga kebutuhan baik rohani maupun jasmani. Kebutuhan tersebut harus terpenuhi dengan seimbang agar manusia tetap dalam kondisi baik jiwa maupun raga.

Manusia memiliki hasrat memperoleh pengetahuan untuk mencapai kebenaran dan kenyataan. Memiliki rasa untuk memenuhi hasrat memperoleh seni dalam arti luas untuk keindahan. Juga berkehendak untuk memenuhi hasrat memperoleh hal-hal yang baik, untuk mencapai kebenaran dan kebaikan.³

Hakekat manusia adalah makhluk individualis sekaligus makhluk sosial. Dalam kenyataannya manusia memiliki sifat egois yang mementingkan dirinya sendiri dalam berbagai hal. Namun manusia juga tidak bisa terlepas pada individu lain dan lingkungan sekitarnya. Manusia memang tidak akan bisa hidup sendiri, karena sudah menjadi kodratnya manusia membutuhkan orang lain dalam hal apapun. Sebagai wujud dari sikap dan sifat manusia yang secara alami dan apa adanya, dan hakekat manusia secara keseluruhan adalah berkeragaan, kejiwaan, berakal, berasa, berkehendak, berindividu, bermakhluk sosial, berkepribadian sendiri serta makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Yang berarti bangsa dan negara Indonesia bersatu dan berdaulat. Jika Ketuhanan Yang Maha Esa menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan, serta

3 Kaelan. *Pendidikan Pancasila* (edisi reformasi 2010) (Paradigma, Yogyakarta, 2010), hal. 57.

Kemanusiaan Yang Adail dan Beradab perwujudan manusia dengan manusia lainnya, maka Persatuan Indonesia adalah wujud rasa nasionalisme seseorang terhadap bangsanya.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, rasa persatuan terhadap bangsa terdiri dari berbagai ras, suku, agama dan daerah juga bahasa. Namun perbedaan yang ada justru membuat negara kita beragam dan memiliki banyak budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Keberagaman negara Indonesia menjadi hal yang menarik dan unik dimata dunia internasional. Jika Amerika Serikat menjadi negara federal, berbeda halnya dengan Indonesia yang bersatu dengan wilayah kepulauan dari Sabang sampai Merauke.

Persatuan dalam diri seluruh bangsa ini memang harus dipupuk agar setelah dewasa tetap mempunyai rasa cinta dan bangsa terhadap negara. Pada era globalisasi sekarang ini makin berkurang nya rasa persatuan dan nasionalisme masyarakat Indonesia. Hal itu terjadi karena derasnya arus modernisasi yang tumbuh selain itu juga berakhirnya Orde Baru yang otoriter yang berkuasa lebih dari tiga puluh dua tahun. Saat reformasi negara kita menjadi negara demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Namun karena demokrasi itu pula banyak hal buruk berdampak pada negara kita. Salah satunya terlepasnya Timor Timur dari Negera Kesatuan Republik Indonesia dan sekarang berganti nama menjadi Timor Leste.

Sila Keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila ini hanya meliputi sebagian lingkup hidup, adalah hidup bersama didalam masyarakat dan negara. Dalam sila keempat yang berpegang pada kerakyatan dalam arti bahwa negara kita adalah negara yang menjunjung aspirasi dan kepentingan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Dalam negara Indonesia, rakyatlah yang berdaulat. Rakyat mempunyai peran

penting dalam kelangsungan negara. Seperti saat proklamasi kemerdekaan, lengsernya Presiden Soekarno akibat peristiwa G30S/PKI, berakhirnya Orde Baru setelah tiga puluh dua tahun berkuasa. Bahkan di era reformasi rakyat dilibatkan langsung dalam memilih anggota legislatif juga presiden. Itu adalah bentuk aspirasi rakyat dalam mengisi peran mereka sebagai warga negara yang baik. Perkembangan dalam hal transparansi pemerintah terhadap rakyat saat ini memang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Peran dewan perwakilan rakyat yang harusnya menjadi suara rakyat di pemerintahanpun seperti masih jauh dari harapan. Bahkan tidak sedikit dari para wakil rakyat itu melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) untuk kepentingan pribadi mereka. Hal itu memang menjadi ironi tersendiri dalam keberlangsungan demokrasi yang baru dirasakan rakyat kurang lebih empat belas tahun. Pembentukan sistem memang harus dilakukan agar tidak sampai berlarut-larut persoalan yang menjadi ganjalan untuk membuat negara ini lebih baik lagi.

Demokrasi yang dianut negara Indonesia memang menjadikan rakyat sebagai penentu akhir. Semboyan yang selalu dikatan adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat yang artinya rakyat yang menentukan dan memilih. Dan pada akhirnya akan kembali pada rakyat, karena rakyat yang merasakan hasil pilihan mereka sendiri.

Sila kelima yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dalam Pancasila ini adalah sebagai perwujudan dari sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia serta sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Hal itu menjadi bagian penting dalam refleksi Pancasila yang sudah menjadi bagian dalam diri seluruh masyarakat Indonesia.

Sila kelima yang bermakna keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah adil untuk seluruh elemen masyarakat Indonesia. Keadilan itu juga bisa dalam bentuk hukum-hukum yang berlaku kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sebagai negara hukum, Indonesia memang masih jauh dari fakta yang ada dilapangan. Banyak kecurangan dalam proses peradilan yang terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Hal itu menjadi ironi tersendiri karena sebagai negara yang berpegang pada peradilan justru para penegak hukum yang banyak melakukan pelanggaran.

Fungsi Pancasila

a. Pancasila sebagai sistem filsafat

Filsafat yang berasal dari bahasa Yunani yang bermakna cinta kebijaksanaan. Ada dua pokok ilmu filsafat yaitu: filsafat sebagai produk yang mencakup pengertian. Filsafat yang adalah induk dari berbagai macam ilmu. Filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu juga pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh filsuf sejak zaman dahulu. Selain itu filsafat sebagai suatu proses yang diartikan bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu masalah dengan menggunakan suatu cara atau metode tertentu sesuai dengan objeknya.⁴

Ilmu filsafat memang berkembang secara pesat diseluruh belahan dunia bahkan di Eropa filsafat adalah ilmu yang penting dan populer dikalangan para bangsawan. Perkembangan yang sangat pesat itupun membuat para filsuf menciptakan cabang-cabang filsafat yang pokok adalah: Metafisika, Epistemologi, Metodologi, Logika, Etika dan Estetika.

Kesatuan sila-sila Pancasila para hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal logis saja

4 Kaelan. *Ibid*, hal. 62.

namun juga meliputi kesatuan dasar ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. Sebagaimana dijelaskan bahwa kesatuan sila-sila pancasila adalah bersifat hierarkhis dan mempunyai bentuk piramidal, digunakan untuk menggambarkan hubungan kesatuan sila-sila pancasila itu dalam arti formal logis. Selain kesatuan sila-sila makna serta hakikat dalam hal kuantitas juga dalam hal isi sifatnya yaitu menyangkut makna serta hakikat sila-sila pancasila. Kesatuan yang demikian ini meliputi kesatuan dalam hal ontologis, dasar epistemologis serta dasar aksiologis dari sila-sila pancasila.

Secara filosofis pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis dan dasar aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya misalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme dan lain paham filsafat didunia.⁵

b. Pancasila sebagai etika politik

Pancasila pada hakekatnya adalah suatu nilai yang menjadi sumber dari norma-norma yang berlaku didalam masyarakat diantaranya norma hukum, moral dan kenegaraan. Didalam filsafat pancasila ada beberapa sifat diantaranya kritis, mendasar, rasional, sistematis dan komprehensif yang semuanya adalah suatu nilai. Dengan demikian pemikiran yang ada tidak langsung menjabarkan tentang norma-norma melainkan suatu nilai yang bersifat dasar.

Secara umum etika adalah perilaku atau tingkah laku. Dalam berpolitik juga harus memiliki etika agar sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dalam lingkungan sekitarnya. Perpolitikan tanah air sekarang ini memang sedang berada dibatas paling rendah dalam sejarah

5 Suwarno. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia* (Kanisius, Yogyakarta, 1993), hal. 26.

Indonesia. Banyak sekali kecurangan dalam pemilihan umum yang seharusnya berazaskan jujur, adil, umum dan rahasia. Jika para aktor politik menjalankan arti dan fungsi pancasila hal itu tentu tidak akan terjadi.

Etika politik berhubungan dengan manusia sebagai aktor politik. Yang mengkhususkan moral manusia sebagai pelaku politik. Politik erat kaitannya dengan pancasila karena berhubungan dengan pemerintahan. Karena biasanya para aktor politik juga aktor dalam pemerintahan pula.

Etika dibagi menjadi dua kelompok yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum membahas prinsip-prinsip dasar segenap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip itu dalam hubungannya dengan kewajiban manusia dalam berbagai lingkup kehidupannya. Etika khusus dibedakan menjadi dua yaitu: etika individual yang membahas kewajiban manusia sebagai makhluk individu terhadap dirinya sendiri, serta melalui suara hati terhadap Tuhannya. Juga ada etika sosial membahas kewajiban serta norma-norma moral yang seharusnya dipatuhi dalam hubungan dengan sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara, etika sosial memuat banyak etika yang mengenai wilayah-wilayah kehidupan manusia tertentu, misalnya etika keluarga, etika profesi, etika lingkungan, etika pendidikan, etika seksual dan termasuk juga etika politik yang menyangkut dimensi politik manusia.⁶

Penyimpangan Terhadap Pancasila

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia memang seharusnya di pelaraji serta di amalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Selain mempelajari fungsi dan arti dari Pancasila, kita juga harus tahu serajah dari Pancasila. Dimana para pendiri bangsa ini benar-benar mengerahkan tenaga dan pikiran mereka

untuk merumuskan Pancasila, hal itu dilakukan karena seluruh tokoh bangsa pada masa itu ingin menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat serta menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur.

Indonesia adalah negara dengan berbagai macam kebudayaan dan bahasa, hal itu membuat negara kita sangat istimewa. Berbagai suku ada dalam satu negara namun hal itu sering membuat kita terlibat dalam suatu masalah. Sering kali terjadi perselisihan antara warga karena masalah saling menghina satu dan lainnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila, Pancasila menjadikan keberagaman negara kita sebagai alat pemersatu bukan untuk memecah belah tali persaudaraan seluruh masyarakat Indonesia.

Dasar negara dan Ideologi memang bisa di rubah, tetapi saat itu telah di rubah maka akan berubah pula seluruh tatanan yang ada dalam negara tersebut. Hal itu tentu akan berdampak pada seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal yang paling mendasar dalam pemerintah adalah terjalinnya hubungan yang baik antara badan eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Hubungan yang berarti sama-sama mengabdikan pada rakyat yang telah memberi mereka kepercayaan serta mengesampingkan kepentingan pribadi.

Di masa sekarang ini terjadi banyak sekali pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah serta penegak hukum. Padahal mereka adalah panutan rakyat, setiap gerak-gerik mereka di nilai oleh masyarakat. Sekarang ini posisi sebagai kepala daerah atau anggota legislatif di minati bukan semata-mata keinginan mengabdikan pada rakyat dan negara tetapi justru di jadikan ajang untuk memperkaya diri sendiri dan menjadi arena pamer di kalangan elit politik. Posisi ini memang menjadi kendaraan partai politik untuk menaikkan pamor.

Penyimpangan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat memang bukan hal

yang baru. Banyak di antaranya terjadi karena masyarakat kurang tahu atau bahkan sama sekali tidak tahu tentang arti dan fungsi Pancasila. Mereka hanya tahu bahwa dasar negara adalah Pancasila dan ada lima sila. Kurangnya pemahaman masyarakat bisa dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah atau kurangnya minat masyarakat untuk mengetahuinya. Hal itu menjadi wajar karena pemerintah sendiripun kurang memberikan sosialisasi. Selain dari hanya sosialisasi di butuhkan pula bukti yang nyata dari perilaku para pemimpin bangsa.

Menjadi ironi adalah dunia pendidikan di Indonesia sekarang ini. Banyak terjadinya kecurangan dalam berbagai hal. Seperti dana pendidikan yang harusnya di gunakan untuk sarana serta prasarana penunjang belajar untuk siswa justru di korupsi oleh para wakil rakyat yang harusnya mengawasi proses menyalurkan. Selain itu juga peran guru, guru dulunya di sebut pahlawan tanpa tanda jasa namun sekarang sebutan itu kurang tepat. Guru yang seharusnya mendidik muridnya yang adalah generasi penerus justru malah tidak memberikan contoh yang baik.

Korupsi dalam pemerintahan tidak lepas dari dunia pendidikan di negeri ini, bagaimana bisa menghasilkan penerus bangsa yang baik dan jujur kalau di sekolah pelajaran agama serta moral hanya sebagai pelengkap. Dalam satu minggu hanya kurang dari dua jam proses belajar mengajar.

Fokus pemerintah tentang nilai minimal dalam UN (Ujian Nasional) juga berdampak buruk bagi para siswa. Pemerintah hanya mengejar *kuantitas* tanpa memikirkan *kualitas*. Hal itu membuat para siswa melakukan kecurangan bahkan dengan di sengaja. Tidak dapat di pungkiri hal itu memang sudah seperti tradisi, setiap UN pasti banyak di temukan kecurangan. Mulai dari aksi mencontek sampai membeli kunci jawaban agar dapat lulus dengan nilai yang bagus.

Penentuan lulus atau tidak seorang siswa dalam UN seharusnya bukan hanya dari nilai yang mereka dapatkan saat UN. Walaupun sekarang nilai selama pembelajaran juga di hitung namun hal itu justru menimbulkan aksi kecurangan baru karena banyak guru memanipulasi nilai agar siswanya lulus. Hal itu dilakukan tidak membuat malu nama sekolah dan menarik minat siswa baru untuk masuk sekolah tersebut.

Pemerintah harus terlebih dulu meningkatkan kualitasnya sebagai pendukung program pendidikan Nasional. Setelah itu baru melakukan program-program untuk meningkatkan kualitas siswa. Yang terpenting adalah pelajaran moral dan agama untuk para siswa agar menjadi bekal untuk masa depan mereka. Serta kualitas pendidik yang baik, karena sekarang ini banyak siswa yang mengikuti lembaga bimbingan belajar yang sekarang banyak di daerah-daerah. Jika banyak siswa mengikuti program bimbingan belajar hal itu menandakan bahwa sistem pendidikan kita salah dan sudah seharusnya pula di perbaiki.

Bagaimana ingin menjadi negara yang maju dan bebas dari korupsi kalau sistem pada pendidikan saja sudah salah. Hal itu yang membuat anak-anak dari kalangan orang kaya lebih memilih pendidikan di luar negeri di bandingkan di negaranya sendiri. Pendidikan bukan hanya sarana untuk mendapatkan nilai yang bagus tetapi yang lebih penting adalah untuk membentuk kepribadian serta karakter yang baik agar kelak di masa yang akan datang bisa menjadi pemimpin yang baik.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah fungsi dan arti pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi dasar masyarakat Indonesia mulai bergeser. Hal itu jelas terlihat dalam berbagai aspek kehidupan yang terjadi

dalam masyarakat secara umum. Mulai dari pelanggaran norma-norma sosial, hukum bahkan norma agama pun dilanggar. Pelanggaran dilakukan oleh masyarakat yang belum mengetahui tentang arti dan fungsi pancasila juga dilakukan oleh masyarakat yang sudah mengetahui. Bahkan tidak sedikit dilakukan oleh para pejabat pemerintahan juga para anggota legislatif. Mereka melakukan itu untuk kepentingan pribadi yang seharusnya tugas mereka adalah melindungi serta member contoh yang baik kepada masyarakat pada umumnya. Hal itu tentu menjadi ironi tersendiri. Ditengah arus globalisasi yang sekarang mewabah di Indonesia, tidak memberikan dampak yang positif justru banyak dampak negative dari kemajuan ilmu dan teknologi tersebut. Karena hal itu membuat nasionalisme bangsa menjadi luntur dan bahkan tidak peduli lagi tentang kebudayaan atau permasalahan yang sedang melanda bangsa ini.

Pendidikan adalah sarana terpenting dalam membentuk moral serta kepribadian seorang manusia selain dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Hal tersebut seharusnya menjadikan pendidikan bersih dari praktek KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Sebagai sarana pembentuk kepribadian anak bangsa pendidikan di Indonesia sangatlah tidak layak. Banyak terjadi kecurangan dalam berbagai hal dari teknis maupun non teknis selain itu juga adanya kelas sosial dalam dunia pendidikan. Yang kaya akan dengan mudah bersekolah di sekolah yang di anggap sebagi sekolah unggulan meskipun dari segi kemampuan kurang dia anggap "*pintar*". Sementara yang miskin hanya mampu bersekolah di sekolah yang biasa saja meskipun mereka biasanya pandai. Yang terpenting sekarang adalah berapa uang yang di miliki bukan karena kemampuan anak itu bersekolah di tempat tersebut. Apakah akan seperti ini terus? Bagaimana masyarakat yang benar-benar tidak mampu dapat mengakses pendidikan.

Pendidikan adalah hal yang wajib di dapatkan oleh seluruh warga negara dan pemerintah seharusnya benar-benar serius menangani permasalahan ketimpangan sosial yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Karena hal itu adalah cita-cita bangsa ini, bebas dari segala macam bentuk penjajahan termasuk penjajahan dalam bentuk kebodohan warga negara. Jika kita kembali pada arti dan fungsi Pancasila untuk di pelajari serta di amalkan maka permasalahan bangsa saat ini tidak akan pernah terjadi. Karena arti dan fungsi Pancasila adalah cita-cita para pejuang kemerdekaan yang sifatnya sepanjang masa.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaelan. *Pendidikan Pancasila* (edisi reformasi 2010) (Paradigma, Yogyakarta, 2010).
- Notonegoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer* (Bina Aksara, Jakarta, 1983).
- Soko Wiyono, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kerangka Negara Hukum yang Demokratis Berdasarkan Pancasila*. Jurnal Konstitusi. Vol. 1 No. 2, (Malang: Universitas Wisnuwardhana, 2009).
- Suwarno. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia* (Kanisius, Yogyakarta, 1993).
- Teguh Prasetyo. *Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila* (Media Perkasa, Yogyakarta, 2013).